

ANALISIS PERJALANAN BANGSA DAN HARAPAN KE DEPAN QUO VADIS INDONESIA?

Putra Astamam*)

Takdir perjalanan rakyat dan masyarakat yang menghuni tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Marauke mengalami perjalanan panjang, yang di satu pihak amat memprihatinkan dan di lain pihak penuh tantangan yang berpuncak pada kebanggaan Gerakan Kebangsaan yang dengan penuh heroisme mampu meraih kemerdekaan dari tangan penjajah dan tegak sebagai bangsa yang terhormat.

Perjalanan Bangsa

Diawali dengan kejayaan kerajaan-kerajaan masa lalu seperti Sriwijaya dan Majapahit yang pada masa itu rakyat di tanah tumpah darah Indonesia telah mengalami kemerdekaan, dalam arti telah memiliki pemerintahan sendiri, memiliki kemandirian dalam mengatur kehidupan politik, sosial budaya, dan ekonomi termasuk perdagangan luar negeri dengan bangsa asing. Demikianlah VOC sebagai perusahaan dagang Belanda datang ke Indonesia mencari rempah-rempah, melakukan perdagangan dengan pengusaha dan penguasa dimasa itu dengan taktik dan strategi yang berujung pada Pe-

merintahan Kolonial Belanda. Maka mulailah masyarakat dan rakyat di tanah tumpah darah Indonesia mengalami penjajahan yang berlangsung selama tiga setengah abad.

Dari praktek kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Belanda terhadap masyarakat dan rakyat Indonesia, amat dirasakan derita senasib dan sepe-nanggung sebagai rakyat yang tertindas namun tidak berdaya untuk melawan. Praktek dan strategi memecah belah (*divide et empera*) oleh pemerintah Belanda berjalan sangat ampuh sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan bersenjata hanya dengan kekuatan

*) Mantan Deputi Operasi Kapolri

lokal. Pada era itu terjadilah perlawanan bersenjata yang gagah berani seperti dalam perang Imam Bonjol, Diponegoro, Teuku Umar, Pattimura. Atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan sebagai rakyat yang tertindas dan atas kesadaran bahwa tidak mungkin melakukan perlawanan tanpa ikatan sebagai bangsa, maka gerakan kebangsaan mulai bangkit dan tumbuh, diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908, kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi kebangsaan lainnya dengan berbagai landasan ideologi maupun azas serta primodealisme yang ada di masyarakat, dan bahkan organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan atau kesukuan seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Selebes dan sebagainya ikut bergerak yang berpuncak pada Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya telah terjadi gerakan kebangsaan yang bersifat organisasi secara fisik maupun ideologi. Dengan perkataan lain semua potensi dan kekuatan yang ada dan yang memungkinkan untuk diadakan (*samen bundeling van alle krachten*) dilakukan untuk melawan dan menghancurkan pemerintahan Belanda. Semua potensi dan kekuatan yang dimiliki rakyat dan bangsa Indonesia, apapun wujudnya dibenarkan oleh para pejuang karena tuju-

annya adalah memerdekakan rakyat bangsa Indonesia. Karena kemerdekaan adalah hak yang paling hakiki bagi sebuah bangsa.

Sampailah kemudian bangsa Indonesia pada jembatan emas menuju kemerdekaannya dengan di Proklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Mulai saat itu berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulailah rakyat, masyarakat bangsa Indonesia memiliki negara dan dimulailah kehidupan *bernegara* di tanah air Indonesia ini. Mulailah rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia memiliki pemerintahan berdaulat yang mengemban azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk menangkal segala praktek yang menginginkan kembalinya pemerintah kolonial disatu pihak dan untuk mendukung pemerintahan republik yang masih muda agar sukses mengemban amanah Undang-Undang Dasar 45 maka dengan penuh kesadaran seluruh komponen bangsa Indonesia mengerahkan semua potensinya untuk bersatu (*samen bundeling van alle krachten*) mendukung pemerintah RI meraih tujuan nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan tatanan kehidupan bernegara.

Tatanan kehidupan bernegara di era kemerdekaan ini harus benar-benar memberikan output persatuan dan kesatuan Indonesia, kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pengambilan keputusan yang dilandasi hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan seperti yang diamanahkan dalam azas kehidupan bernegara yaitu Pancasila.

Analisis Perjalanan Bangsa

Apabila perjalanan bangsa Indonesia kita soroti dari makna dan pengertian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka perlu dipilah bahwa kehidupan *bermasyarakat* adalah kehidupan bersama dan berdampingan secara harmonis diantara komponen-komponen masyarakat itu sendiri tanpa ada kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Setiap komponen hidup dan membangun eksistensinya sendiri tanpa mengganggu dan diganggu komponen lainnya namun secara keseluruhan membangun keharmonisan di bawah pengayoman penguasa pada masa itu. Ibarat kehidupan di sebuah taman bunga yang terdiri dari berbagai jenis dan warna bunga, masing-

masing dengan eksistensinya dan penuh keharmonisan di bawah pengayoman pemilik taman. Jadi pada masa Pemerintahan kolonial sudah ada kehidupan bermasyarakat dengan azasnya masing-masing sesuai dengan ras, suku, agama, golongan dan adat istiadatnya. Pada masa Pemerintahan Republik pun tetap ada kehidupan bermasyarakat dengan azasnya masing-masing, ibarat di sebuah taman bunga dengan segala keharmonisannya. Cuma, bedanya kalau sebelum Proklamasi penguasa dan pengayom taman bunga itu adalah Pemerintahan Kolonial, maka sesudah Proklamasi penguasa dan pengayom taman bunga itu adalah Pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat. Kita tandai bahwa sampai abad XIX belum ada kehidupan berbangsa dalam pengertian bangsa Indonesia.

Di awal abad XX, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo 20 Mei 1908, atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan, atas dasar rasa tertindas dan ketidakmampuan melawan kekuatan pemerintahan kolonial Belanda maka gerakan kebangsaan mulai bangkit, kehidupan berbangsa mulai tumbuh. Berdirinya Boedi Oetomo diikuti oleh berbagai perhimpunan atau partai yang bemuansa kebangsaan, di antaranya Sarekat Islam (1912), In-

dische Partij (1912), Boemi Poetra (1913), Perhimpunan Indonesia (1922) dan lain sebagainya. Para pemuda pun menghimpun diri sesuai asal daerah masing-masing yang keseluruhannya berakumulasi dan berpuncak pada Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, yang dengan demikian Jong Java, Jong Sumatranen, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Pasoendan, Jong Pemoeda Kaem Betawi, dan lain-lain menempatkan diri sebagai komponen bangsa, bagian dari pemuda Indonesia yang mengaku Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Pada era tersebut semua komponen dari gerakan kehidupan berbangsa masih menggunakan azas masing-masing dan hal itu dibenarkan karena bangsa Indonesia sedang melakukan penyatuan seluruh kekuatan (*samen bundeling van alle krachten*) untuk menghancurkan pemerintahan kolonial dan memerdekakan diri dari penjajah. Ibarat di hutan belantara kita membangun kekuatan predator untuk memangsa dan atau mengusir si raja hutan sang penindas. Di lain pihak, pada era itu kehidupan bermasyarakat masih tetap eksis ibarat di taman bunga dengan azasnya masing-masing.

Saat kemerdekaan diproklamasikan dan NKRI didirikan, dimulailah kehidupan *bernegara*

dengan pemerintahan yang bukan penindas rakyat tetapi penyelenggara kesejahteraan rakyat sebagai tujuan nasional yang utama. Pemerintah RI yang baru ini di satu pihak melawan dan mencegah kembalinya pemerintah kolonial, di lain pihak harus membangun pemerintahan yang kuat agar mampu menyelenggarakan amanah rakyat, amanah bangsa dengan sebaik-baiknya. Pada era ini seluruh potensi bangsa harus digerakkan secara *samen bundeling van alle krachten* untuk memperkuat pemerintah NKRI dan *azas kehidupan berbangsa* harus sesuai dengan *azas kehidupan bernegara*. Di lain pihak pada era kemerdekaan ini tetap ada kehidupan bermasyarakat dengan azasnya masing-masing namun pengayomnya sekarang adalah pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat. Jadi kalau kita proyeksikan sasanti bhinneka tunggal ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang berbhinneka dengan azas masing-masing sedangkan kehidupan bernegara adalah bertunggal ika dengan satu azas yaitu Pancasila. Adapun kehidupan berbangsa pada era pemerintah kolonial dibenarkan berbhinneka karena setiap komponen bangsa (apa pun azas-

nya) diperlukan dalam gerakan *samen bundeling van alle krachten* untuk menghancurkan pemerintahan yang eksis atau *incumbent* yaitu Pemerintah Kolonial.

Kehidupan berbangsa *pacta* era pemerintahan Republik Indonesia memerlukan *samen bundeling van alle krachten* semua komponen bangsa untuk memperkuat dan menstabilkan pemerintah NKRI sehingga mampu mengemban misi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, azas setiap komponen bangsa harus satu pula yaitu Pancasila. Demikianlah seharusnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebelum Proklamasi dan sesudah Proklamasi.

Bila kita proyeksikan *sasanti tata - tentrem - kerta - rahardja* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era kemerdekaan ini maka tiada pilihan lain kecuali seluruh komponen bangsa harus taat azas yaitu azas Pancasila. Selama Orde Lama dan Orde Baru telah ada upaya-upaya meluruskan azas kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi diawal Reformasi telah terjadi berbagai praktek yang mengesampingkan azas Pancasila, bahkan ada sementara golongan yang sepertinya menghapuskan bahkan mentabukan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya konsistensi ta-

tanan satu azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah terabaikan sejak pemerintahan Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai azas kehidupan bernegara ditarik ke atas dan disejajarkan dengan ideologi komunis dan agama tertentu yang berlingkup dunia yang akhirnya dikenal dengan *Nasakom*. Pancasila sebagai azas kehidupan bernegara NKRI pastilah titik beratnya pada *Nasionalisme* Indonesia. Menempatkan nasionalisme, komunisme dan agama tertentu (*Nasakom*) dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara sama halnya dengan menempatkan kijang, singa dan beruang di satu kandang. Yang kuat dan buas akan mencabik bahkan memangsa yang lemah. Kita saksikan usaha golongan komunis untuk memaksakan komunisme dan mendominasi kehidupan bernegara melalui jalan kekerasan dengan terjadinya peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan kemudian G 30S / PKI tahun 1965. Demikian juga upaya kekerasan yang dilakukan oleh golongan agama dalam bentuk peristiwa pemberontakan DI/TII Karto Suwiryo. Dalam tatanan kehidupan bernegara selama Orde Baru sampai dengan sekarang, ibaratnya singa telah enyah dari kandang, yang tinggal di satu kandang adalah kijang dan

beruang dengan potensi bahwa setiap saat ada kesempatan si kijing akan dicabik-cabik oleh si beruang. Itulah pengibaratan *nasionalisme religius* yang dianut sebagai tatanan kehidupan bernegara selama Orde Baru dan Orde Reformasi. Kecenderungan mendominasi dengan atau tanpa kekerasan pasti terjadi karena kehidupan bernegara adalah kehidupan merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Pada era Orde Lama bangsa Indonesia sempat terseret ke dalam tatanan kehidupan bernegara yang liberalistik, Pemerintahan parlementer, kehidupan banyak partai dengan azasnya masing-masing yang jelas-jelas menyimpang dari Pancasila. Kemudian dikoreksi dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan penerapan demokrasi terpimpin. Upaya menertibkan tatanan partai politik sebagai komponen kehidupan berbangsa dan bernegara terjebak pada konsep Nasakom yang menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam tragedi nasional kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa pemerintahan Orde Baru telah dirintis untuk menerapkan satu azas dalam kehidupan berpolitik dan itu adalah tatanan yang benar karena kehidupan dalam berpolitik adalah salah satu ben-

tuk kehidupan bernegara, yaitu kehidupan di ranah kekuasaan. Kehidupan bernegara ibarat kehidupan dalam taman safari. Kalau bentuk kehidupan yang ibarat dalam taman safari dilepas dengan azas masing-masing (terang-terangan ataupun kamufase), maka akan terbuka potensi benturan, saling terkam, konflik, ketegangan berkepanjangan yang mengusik bahkan merusak ketentraman secara berkepanjangan pula. Jadi bangsa ini tidak akan pernah tentram dalam arti yang hakiki kalau tatanan kehidupan berbangsa dan bernegaranya tidak betul atau masih salah dan tidak dibetulkan. Maka bangsa yang tidak pernah *tentram* tidak akan pernah bisa melakukan *kerta* (kesibukan kerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja produktif) dan tanpa *kerta* tidak akan tercapai *rahardja* (kesejahteraan lahir batin, kemakmuran yang berkeadilan yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia).

Harapan Bangsa ke Depan

Era reformasi yang bergulir sejak 1998 telah membawa bangsa Indonesia kearah demokratisasi disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai reaksi total atas terpasungnya demokrasi oleh rezim Orde Baru yang otoriter. Tidak kalah pentingnya adalah menegakkan hak

azasi manusia dan gerakan memberantas KKN yang belum pernah dilaksanakan secara serius selama Orde-Orde sebelumnya. Demokratisasi, penegakan HAM dan pemberantasan KKN merupakan prasyarat (*conditio sine quanon*) untuk terwujudnya kemajuan bangsa Indonesia dalam era keterbukaan, informasi teknologi dan globalisasi yang tidak terelakkan di era reformasi ini. Namun betapapun kita berupaya menapak maju sebagai bangsa yang ingin lebih sejahtera maka ketentraman yang berkelanjutan merupakan prasyarat mutlak untuk mendukung seluruh komponen bangsa untuk beraktivitas, kerja keras, kerja cerdas dan kerja produktif menuju kesejahteraan lahir batin, dan kemakmuran yang berkeadilan. Sedangkan untuk mewujudkan ketentraman maka tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bardasar azas Pancasila merupakan prasyarat mutlak juga. Sampai sekarang, azas Pancasila selalu menjadi komoditas politik, kadang-kadang hanya sebagai jargon politik, kadang-kadang sebagai kamufase formal padahal secara materiil tidak demikian adanya. Dalam Undang-Undang Partai Politik yang terdahulu dirumuskan bahwa partai politik seluruhnya mempunyai azas umum yaitu Pancasila, tetapi setiap partai politik

juga mempunyai azas khusus sesuai dengan ideologi dan kepentingannya. Sudah barang tentu setiap partai politik akan berusaha keras memperjuangkan azas khusus dengan konsekuensi berpotensi terjadi banyak gesekan bahkan benturan di lapangan. Demikianpun dalam Undang-Undang tentang Partai Politik (UUD NO. 2 Tahun 2008) terbaru bahwa partai politik mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Dengan sendirinya yang gigih diperjuangkan adalah tujuan khusus partai politik tersebut dengan berpotensi terjadi gesekan dan benturan di lapangan.

Tidak tersosialisasikannya pemilahan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara sejak awal pemerintahan republik telah menimbulkan banyak sekali gesekan dan benturan di antara sesama komponen bangsa dan telah banyak menguras energi bangsa sehingga terlambat melakukan pembangunan nasional. Kehidupan bermasyarakat sering merambah kehidupan bernegara sebaliknya kehidupan bernegara sering merambah ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan berkeagamaan, kesukuan, ras dan golongan serta adat istiadat dan budaya adalah kehidupan bermasyarakat, bukan kehidupan bernegara. Di lain pihak, kehi-

dupan berpartai politik dan kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (legislasi, eksekusi, yudikasi) adalah kehidupan bernegara. Satu sama lain tidak boleh saling merambah apalagi dengan cara-cara memaksakan kehendak, kalau kita tidak ingin terjadi kekacauan, keributan dan kerepotan terus menerus. Banyak contoh yang dapat dikemukakan, antara lain kerepotan karena Undang-Undang Pornografi, munculnya front pembela agama tertentu, kerepotan eksekusi mati karena dinuansai agama, adanya remisi hari raya agama, dan lain sebagainya. Belum lagi hal-hal lain yang merupakan dampak negatif dari salahnya tatanan hidup berbangsa dan bernegara dalam bentuk konflik horizontal maupun vertikal, bahkan dalam bentuk kekerasan yang telah terbukti setiap waktu bisa terjadi. Akan tetapi, kita alami dan saksikan bersama bahwa sudah 63 tahun bangsa Indonesia merdeka ketenteraman sebagai prasyarat pembangunan nasional belum bisa diwujudkan, bahkan belum tergambar wujud ketenteraman itu dalam beberapa dekade kedepan.

Maka kepada penyelenggara negara, elit politik dan seluruh komponen bangsa dihimbau untuk melakukan rekonsiliasi akbar bangsa Indonesia untuk meng-

kaji dan membetulkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia tercinta ini dengan mengembalikan Pancasila secara konsisten sebagai *azas* kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan kelapangan dada setiap komponen bangsa, terlebih komponen yang sedang berkuasa atau yang sedang ikut menikmati kekuasaan sekarang ini untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongannya serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ke depan. Memang untuk tiba pada rekonsiliasi akbar bangsa Indonesia tidak mudah, diperlukan seorang pemimpin bangsa *incumbent* yang kuat, jujur, tegas dan berani serta demokratis dalam bingkai NKRI dan Pancasila.

Di era globalisasi yang berujung kepada perdagangan bebas, maka akan berlaku hukum ekonomi yang kuat mendesak yang lemah, bahkan yang kuat memangsa dan mematikan yang lemah. Bangsa Indonesia harus ke luar dan muncul dengan keunggulan kompetitif, bukan keunggulan komperatif.

Keunggulan kompetitif hanya terwujud dengan 3 syarat, yaitu dengan nasionalisme yang kuat, disiplin nasional yang tinggi, dan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi pula.